

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Noni¹

Yuliani²

yuliani66937@gmail.com

Indri³

Firda Gusmiarsih⁴

Muhammad Danu P⁵

Ahadiyah Agustina⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Mataram

ABSTRACT

The results of the study found that the implementation of Islamic monetary policy had a positive and significant effect on economic growth in Indonesia during the period 2014–2024. Based on the results of a Systematic Literature Review of various literature sources indexed in Elicit, Scispace, OpenAI, DOAJ, and Google Scholar, it was found that Islamic monetary policy plays an important role in maintaining macroeconomic stability, strengthening the real sector, and promoting equitable income distribution through the application of the principles of justice, prohibition of usury, and public interest. Key instruments such as Sharia Bank Indonesia Certificates (SBIS), Bank Indonesia Sukuk, Sharia Short-Term Deposit and Financing Facilities (FASBIS and FPJPS), and the Sharia Monetary Operations (OMS) mechanism have proven effective in regulating liquidity and boosting economic activity without relying on the interest rate system. In addition, the application of profit-sharing contracts such as mudharabah and musyarakah has strengthened the relationship between the financial sector and the real sector, which has had a direct impact on increasing investment, productivity, and community welfare. Overall, the results of this study confirm that Sharia monetary policy not only functions as a macroeconomic control instrument, but also as a means of inclusive, equitable, and sustainable economic development in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: *Sharia Monetary Policy, Economic Growth, Macroeconomic Stability, Real Sector, And Income Distribution, Mudharabah, Musyarakah, Sukuk, And Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).*

ABSTRAK

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan moneter Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2014–2024. Berdasarkan hasil Tinjauan Pustaka Sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang terindeks di Elicit, Scispace, OpenAI, DOAJ, dan Google Scholar, ditemukan bahwa kebijakan moneter Islam berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat sektor riil, dan mendorong pemerataan pendapatan melalui penerapan prinsip keadilan, pelarangan riba, dan kepentingan umum. Instrumen-instrumen utama seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan dan Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FASBIS dan FPJPS), serta mekanisme Operasi Moneter Syariah (OMS) terbukti efektif dalam mengatur likuiditas dan mendorong aktivitas

ekonomi tanpa bergantung pada sistem suku bunga. Selain itu, penerapan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah telah memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang berdampak langsung pada peningkatan investasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian makroekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Makroekonomi, Sektor Riil, dan Distribusi Pendapatan, Mudharabah, Musyarakah, Sukuk, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menjalankan pembangunan nasional (Indah Wahyu Prastiwiet al., 2025). Peningkatan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mencerminkan kemajuan material, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks global, kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendukung aktivitas investasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan yang krusial. Sistem kebijakan moneter konvensional yang berorientasi pada bunga seringkali tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, sistem moneter syariah hadir sebagai alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keberkahan ekonomi. Penting untuk memahami sejauh mana kebijakan moneter syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan inklusif (Ramdani et al., 2025).

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat sejak diberlakukannya dual banking system pada awal 2000-an. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam memperkuat infrastruktur kebijakan moneter syariah melalui regulasi dan instrumen keuangan berbasis prinsip syariah (Laili, 2025). Implementasi kebijakan moneter syariah dilakukan melalui instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Sukuk Bank Indonesia yang beroperasi tanpa bunga. Seluruh instrumen ini berlandaskan prinsip bagi hasil, transparansi, dan keadilan. Dukungan regulasi, peningkatan aset perbankan syariah, dan inovasi produk keuangan telah memperkuat posisi moneter syariah dalam sistem keuangan nasional (Aisyah, 2025). Namun demikian, kontribusi aktual kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam dan sistematis untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut (Abd. Muiz et al., 2024).

Kebijakan moneter syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem konvensional. Tujuannya bukan semata menjaga stabilitas harga, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan dan menghindari praktik spekulatif (Siregar et al., 2025). Sistem ini menekankan aktivitas ekonomi riil melalui mekanisme bagi hasil dan penghindaran riba, sehingga diharapkan dapat mendorong investasi produktif dan menciptakan lapangan kerja (Trisna Eka Sari et al., 2024). Dalam konteks pembangunan nasional, efektivitas kebijakan moneter syariah menjadi kunci bagi optimalisasi peran ekonomi Islam (Fadilah, 2025). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam; sebagian menemukan pengaruh positif antara kebijakan moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian lainnya menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan. Ketidakkonsistenan hasil tersebut menandakan perlunya sintesis ilmiah melalui kajian literatur yang sistematis. Dengan demikian, analisis menyeluruh akan membantu memahami bagaimana kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Secara empiris, implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menemukan bahwa instrumen seperti SBIS dan Sukuk Bank Indonesia dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Harga et al., 2025). Meski demikian, skala dan likuiditas pasar keuangan syariah masih relatif terbatas dibandingkan sistem konvensional, sehingga efek transmisinya belum optimal. Tantangan lainnya adalah

integrasi kebijakan moneter antara sistem syariah dan konvensional yang masih berjalan paralel, bukan sepenuhnya terintegrasi (Padli, 2021). Selain itu, tingkat literasi masyarakat terhadap sistem moneter syariah masih rendah, yang menyebabkan partisipasi publik belum maksimal (Rahmadewi et al., 2024). Faktor eksternal seperti fluktuasi global dan kebijakan fiskal pemerintah juga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter syariah (Firdaus et al., 2025). Kondisi tersebut memperkuat urgensi perlunya kajian sistematis yang dapat menjelaskan berbagai determinan yang memoderasi hubungan antara kebijakan moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan moneter syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan (Ramdani et al., 2025). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial menjadikan kebijakan ini relevan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan (Ghozali, 2018). Melalui sistem bagi hasil, perbankan syariah dapat menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif dan riil, sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Implementasi kebijakan moneter syariah juga berpotensi menekan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat serta mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai dampak kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi penting tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga sosial dan moral (Mansur, 2013). Kajian literatur sistematis

dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia.

Meskipun penelitian terkait kebijakan moneter syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran menyeluruh. Banyak studi yang hanya menyoroti peran lembaga keuangan syariah tanpa mengaitkannya secara langsung dengan indikator makroekonomi seperti inflasi, PDB, dan investasi nasional. Selain itu, pendekatan komparatif antara sistem moneter konvensional dan syariah masih jarang digunakan secara mendalam (Alya et al., 2024). Akibatnya, belum ada kesimpulan yang tegas mengenai sejauh mana kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Fahira et al., 2023). Di sisi lain, perbedaan metodologi, periode observasi, dan indikator penelitian menimbulkan variasi hasil yang signifikan. Untuk itu, metode Systematic Literature Review (SLR) menjadi pendekatan yang relevan karena mampu mengintegrasikan berbagai hasil penelitian secara objektif dan terstruktur. Kajian ini akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan moneter syariah yang lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah secara sistematis pengaruh implementasi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola hubungan, tingkat pengaruh, serta faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan efektivitas kebijakan tersebut. Kajian ini juga berupaya memetakan tren dan arah penelitian selama

satu dekade terakhir (2015–2025) guna memberikan gambaran perkembangan wacana akademik di bidang ekonomi syariah. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sementara secara praktis, hasilnya dapat menjadi acuan bagi Bank Indonesia, OJK, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat desain moneter syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang bertujuan untuk menelaah secara sistematis berbagai hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kajian ini berfokus pada upaya mengidentifikasi hubungan, tingkat pengaruh, serta faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah seperti Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Elicit, dan Garuda, dengan rentang publikasi tahun 2015–2025. Kata kunci yang digunakan antara lain “kebijakan moneter syariah,” “pertumbuhan ekonomi,” “Bank Indonesia Syariah,” dan “Islamic monetary policy and economic growth.” Artikel yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik, kejelasan metodologi, serta ketersediaan teks

lengkap agar hasil kajian benar-benar menggambarkan kondisi empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam proses seleksi, hanya literatur yang memenuhi kriteria inklusi seperti konteks penelitian di Indonesia, relevansi dengan kebijakan moneter syariah, serta penggunaan data empiris yang dimasukkan ke dalam analisis. Sementara itu, artikel konseptual, publikasi non-ilmiah, atau penelitian yang tidak relevan dikeluarkan dari kajian. Selanjutnya, tahap ekstraksi data dilakukan dengan mencatat informasi penting dari setiap artikel, seperti penulis, tahun, metode penelitian, indikator kebijakan moneter syariah, serta hasil temuan utama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-tematik untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kesenjangan penelitian. Melalui langkah ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menghasilkan rekomendasi konseptual bagi penguatan kebijakan moneter berbasis prinsip syariah di masa mendatang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian terkait kebijakan moneter syariah, ditemukan bahwa fokus kajiannya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama yang merepresentasikan arah dan dinamika pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Bidang pertama membahas instrumen dan implementasi kebijakan moneter syariah oleh Bank Indonesia, yang menyoroti fungsi SBIS, sukuk, dan OMS dalam menjaga likuiditas serta stabilitas ekonomi. Bidang kedua menelaah peran nilai

dan prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam membentuk kebijakan moneter yang berorientasi sosial. Bidang ketiga menyoroti instrumen sosial ekonomi seperti zakat, infaq, dan sedekah yang berperan dalam pemerataan kekayaan dan pemberdayaan sektor produktif. Selanjutnya, bidang keempat mengkaji hubungan antara keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan menekankan kontribusi sektor keuangan terhadap peningkatan investasi dan efisiensi ekonomi. Terakhir, bidang kelima membahas efektivitas kebijakan moneter syariah terhadap kinerja ekonomi makro, khususnya dalam konteks kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kelima bidang tersebut dirangkum dalam tabel berikut untuk memperlihatkan keterkaitan antar-penelitian dan variabel yang dikaji.

Tabel.1

No	Bidang atau Fokus Riset	Nama-nama Penulis yang Se-bidang	Insight atau Variabel Riset Utama
1	Instrumen dan Implementasi Kebijakan Moneter Syariah oleh Bank Indonesia	Suar et al. (2022); Rini (2023); Muhammad et al. (2024)	Fokus pada peran instrumen seperti SBIS, Sukuk Bank Indonesia, dan Qard al-Hasan dalam pengendalian likuiditas dan stabilitas ekonomi. Operasi Moneter Syariah (OMS) berfungsi menjaga stabilitas moneter, distribusi likuiditas, serta memperkuat pembiayaan berbasis <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Variabel utama: Instrumen moneter syariah, likuiditas, stabilitas ekonomi, dan sektor riil.
2	Peran Nilai dan Prinsip Islam dalam Kebijakan Moneter Syariah	Zahera et al. (2024); Chalid & Zubaidah (2025)	Menyoroti fondasi normatif kebijakan moneter syariah yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan . Tujuan utamanya menciptakan keseimbangan ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan. Variabel riset mencakup keadilan ekonomi, pemerataan, stabilitas harga, dan kesejahteraan sosial .
3	Instrumen Sosial Ekonomi dalam Kebijakan Moneter Syariah	Zahera et al. (2024); Septiana et al. (2024)	Mengkaji peran zakat, infaq, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi kekayaan serta integrasinya dengan sistem bagi hasil <i>mudharabah-musyarakah</i> . Instrumen ini diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Variabel utama: zakat-infaq-sedekah, distribusi pendapatan, sektor produktif, dan kesejahteraan umat.
4	Hubungan Keuangan Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi (Kausalitas dan Korelasi)	Gani & Bahari (2019); Ali & Shear (2025)	Studi empiris yang menemukan korelasi positif dan signifikan antara pengembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mendukung <i>supply-leading hypothesis</i> bahwa sistem keuangan syariah mendorong investasi dan efisiensi alokasi sumber daya. Variabel riset: pertumbuhan ekonomi, keuangan syariah, investasi, efisiensi alokasi.

Fokus dan ruang lingkup (focus and scope) yang disajikan pada tabel tersebut mencerminkan perkembangan riset kebijakan moneter syariah yang semakin luas dan multidimensional. Kajian tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis implementasi instrumen moneter, tetapi juga pada dimensi normatif, sosial, dan makroekonomi yang saling berkelindan dalam membentuk stabilitas ekonomi berbasis prinsip Islam. Fokus penelitian berkisar dari efektivitas instrumen kebijakan seperti SBIS dan OMS hingga pada peran nilai-nilai keadilan serta redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Sementara itu, ruang lingkungannya mencakup analisis empiris mengenai hubungan keuangan syariah dengan pertumbuhan ekonomi, efisiensi lembaga keuangan, serta kontribusi kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tabel tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai arah riset kebijakan moneter syariah yang tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip maqashid syariah.

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme implementasi kebijakan moneter syariah yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah?

Bentuk dan mekanisme implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia melalui penerapan instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syaripudin, 2024). Instrumen utama yang digunakan meliputi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBI-S), serta Fasilitas Simpanan dan Pembiayaan Jangka

Pendek Syariah (FASBIS dan FPJPS) yang berlandaskan akad-akad seperti mudharabah, musharakah, dan wadiah. Melalui instrumen ini, Bank Indonesia mengatur likuiditas perbankan syariah tanpa bergantung pada bunga (riba), melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan jual beli aset sesuai prinsip sharia compliance (Risma, 2024). Tujuan utama penerapan kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, serta memastikan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia juga menerapkan Operasi Moneter Syariah (OMS) yang menjadi bagian integral dari kebijakan moneter nasional. OMS meliputi operasi pasar terbuka berbasis sukuk, transaksi repo syariah, dan fasilitas pembiayaan likuiditas syariah bagi bank-bank syariah. Mekanisme ini mendorong stabilitas sistem keuangan dengan menyalurkan likuiditas ke lembaga-lembaga keuangan syariah secara efisien dan sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah turut berperan dalam mengimplementasikan kebijakan moneter melalui penyaluran dana berbasis akad bagi hasil serta pembiayaan produktif yang berorientasi pada sektor riil, seperti UMKM, pertanian, dan industri halal (Aisyah, 2025). Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya menjadi alat pengendalian makroekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Secara interpretatif, implementasi kebijakan moneter syariah di Indonesia mencerminkan upaya transformasi sistem keuangan menuju model yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menonjol karena mengintegrasikan aspek moral dan sosial ke dalam kerangka kebijakan ekonomi, berbeda dari sistem konvensional yang berorientasi pada efisiensi finansial

semata. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur keuangan syariah, literasi masyarakat, serta harmonisasi regulasi antara otoritas moneter dan lembaga keuangan syariah. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi makro, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan inovasi instrumen dan penetrasi pasar yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan kebijakan moneter syariah perlu diarahkan pada peningkatan sinergi antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin optimal dan berkeadilan.

2. Bagaimana kebijakan moneter syariah mempengaruhi distribusi pendapatan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat?

Kebijakan moneter syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pendapatan melalui penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam. Sistem moneter syariah menolak praktik riba dan spekulasi berlebihan yang menjadi sumber ketimpangan ekonomi dalam sistem konvensional. Sebagai gantinya, kebijakan ini mengedepankan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam akad *mudharabah* dan *musharakah*, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Srisusilawati, 2017). Selain itu, instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah yang terintegrasi dalam sistem keuangan syariah turut memperkuat redistribusi pendapatan, karena mampu menyalurkan kekayaan dari kelompok berlebih kepada masyarakat yang

membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari sisi stabilitas harga, kebijakan moneter syariah beroperasi dengan memastikan kesesuaian antara penawaran uang dan pertumbuhan sektor riil, sehingga mampu menghindari inflasi berbasis spekulasi yang lazim terjadi dalam sistem berbasis bunga. Bank Indonesia melalui Operasi Moneter Syariah (OMS) menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia, dan *Qard al-Hasan* untuk mengatur likuiditas tanpa melanggar prinsip larangan riba (Rini, 2023). Pendekatan ini tidak hanya menjaga kestabilan nilai tukar dan tingkat inflasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah berperan ganda—mengendalikan stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi riil yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara interpretatif, kebijakan moneter syariah dapat dipandang sebagai pendekatan ekonomi yang menggabungkan dimensi moral dan sosial dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Berbeda dari sistem konvensional yang berorientasi pada efisiensi pasar dan pertumbuhan berbasis bunga, sistem syariah menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang merata sebagai tujuan utama. Evaluasi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan produktif dan

memperkuat konektivitas dengan sektor riil. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah, pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan prinsip syariah, serta sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal merupakan faktor penting agar kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

3. Apa saja hasil temuan empiris utama dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara kebijakan moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi?

Hasil temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penguatan sektor riil dan stabilitas makroekonomi. Sebagian besar studi mendukung pandangan supply-leading hypothesis, yang menyatakan bahwa perkembangan sistem keuangan syariah dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian Gani & Bahari (2019) serta Ali & Shear (2025) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas keuangan syariah, terutama melalui pembiayaan berbasis mudharabah dan musharakah, berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi alokasi sumber daya. Selain itu, penelitian Suar et al. (2022) menemukan bahwa penerapan instrumen kebijakan seperti Sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mampu menjaga stabilitas likuiditas tanpa menimbulkan distorsi moneter, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Temuan lain menyoroti peran kebijakan moneter syariah dalam menciptakan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil sebagai ciri khas utama sistem keuangan Islam. Kebijakan moneter syariah berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan dan penurunan tingkat ketimpangan ekonomi melalui mekanisme keuangan berbasis nilai moral dan sosial. Mengemukakan bahwa stabilitas yang dihasilkan dari implementasi kebijakan moneter syariah berpengaruh positif terhadap kepercayaan investor, yang selanjutnya meningkatkan investasi di sektor-sektor produktif (Nasution, 2023). Selain itu, kebijakan berbasis prinsip keadilan dan larangan riba terbukti lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global karena menekankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan aset riil, bukan spekulatif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.

Secara interpretatif, hasil-hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem ekonomi nasional melalui mekanisme yang lebih etis dan berkelanjutan. Namun, secara evaluatif, efektivitas hubungan antara kebijakan moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi masih sangat bergantung pada kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan produktif dan mendorong keterhubungan dengan sektor riil. Beberapa studi, seperti yang ditemukan oleh Mu'arrif (2024), menunjukkan bahwa pengaruh positif kebijakan ini tidak selalu signifikan karena masih adanya kendala struktural, seperti rendahnya efisiensi operasional, keterbatasan literasi keuangan syariah, serta belum optimalnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, penguatan

kebijakan makroprudensial berbasis syariah, inovasi instrumen moneter, dan pengembangan infrastruktur keuangan Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kebijakan moneter syariah benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.



Kebijakan moneter syariah merupakan sistem kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dengan menolak praktik riba serta menekankan distribusi kekayaan yang merata. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), sukuk, qard al-hasan, serta skema bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang berfungsi menjaga likuiditas sekaligus mendorong aktivitas sektor riil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencapai stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan adanya korelasi positif antara pengembangan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mendukung supply-leading hypothesis, meskipun efektivitasnya bergantung pada efisiensi lembaga keuangan,

kesiapan sistem ekonomi nasional, serta kemampuan menyalurkan dana ke sektor produktif. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekonomi, tetapi juga sebagai sarana moral dan sosial untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kemaslahatan umat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai temuan empiris dan sintesis konseptual, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter syariah memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat sektor riil, serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil di Indonesia. Melalui penerapan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan dan Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FASBIS dan FPJPS), serta mekanisme berbasis akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali likuiditas, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan larangan riba memperlihatkan bahwa sistem moneter syariah mampu menawarkan alternatif yang lebih etis dan resilien dibandingkan sistem konvensional. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah terbukti efektif dalam menciptakan stabilitas harga, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu

diperhatikan untuk memperkuat landasan empiris dan implementasi kebijakan moneter syariah di masa mendatang. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti hubungan korelasional antara instrumen moneter syariah dan pertumbuhan ekonomi, tanpa menggali secara mendalam efektivitas mekanisme transmisi kebijakan terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, stabilitas nilai tukar, serta ketimpangan pendapatan. Selain itu, peran digitalisasi dan inovasi keuangan syariah dalam memperluas jangkauan serta efisiensi kebijakan moneter masih jarang dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, topik riset yang mendesak untuk diteliti adalah **“Analisis Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Era Digitalisasi Keuangan.”** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat kebijakan moneter syariah Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing di tengah tantangan transformasi ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muiz, Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Mengatasi Masalah Kualitas, Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. *Jurnal IHSA Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 46–64. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i3.272>
- Aisyah, A., & Ansori, M. (2025). Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 14–25. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v5i1.3405>
- Alya Azhana Maulidha, Deni Supriatna, Lidia Nuramalina, & Muhamad Tanzi. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro: Analisis Perbandingan Dengan Kebijakan Konvensional. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(3), 59–74. <https://doi.org/10.54783/jemba.v2i3.72>
- Dila Fahira, Sugianto Sugianto, & Muhammad Syahbudi. (2023). Pengaruh Transmisi Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(6), 409–420. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6.814>
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6), 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>
- Firdaus, F., Wati, E., & Amalia, P. (2025). Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Stabilitas Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 91–101. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.144>
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- Harga, S., Pertumbuhan, D., Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Dwi, Z., Putri, D.,

- & Astuti, R. P. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menjaga Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 207–213.
- Indah Wahyu Prastiwi, Dinda Amalia, & Siti Khairani. (2025). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 297–305. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2079>
- Laili, S. N. (2025). Peran Sbsn Dalam Kebijakan Moneter Syariah: Studi Atas Operasi Pasar Terbuka Oleh Bank Indonesia. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 4(2), 200–209. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2252>
- Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Tsaqafah*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.38>
- Nasution. (2023). Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis Literature Review. *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 566–577. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Padli, M. S. (2021). Integrasi Perbankan dan Fintech Syariah Guna Mendukung Merger Bank Bumh Syariah dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19. *Muslim Heritage*, 6(2), 303–324. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.2878>
- Rahmadewi, R., Febriansah, D., Khalifah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Edukasi Dan Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3). <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.171>
- Ramdani, N. F., Appriochman, R., Pembangunan, E., Bisnis, F. E., & Teknologi, U. (2025). *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pembangunan*. 1(3), 188–195. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i3.280>
- Rini, N. (2023). Qard Al Hasan: Instrumen Moneter Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 144–154. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i2.8047>
- Risma Wati, & Muhammad Iqbal Fasa. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Siregar, F. D., Lubis, A. S., & Daulay, A. A. (2025). Peran Bank Syariah Dalam Stabilitas Moneter : Pendekatan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 140–144. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.408>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Syaripudin, E. I., & Soleha, A. (2024). Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 3(1), 49–55.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.749>

Trisna Eka Sari, Melisa, Seri Wahyuni, & Zulfikar Hasan. (2024). Theoretical Analysis of the Effectiveness of the Sharia Financial System in Facing the Global Economic Crisis. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56–70.
<https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.19>.